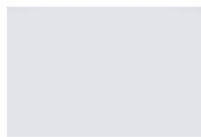




RENCANA KERJA (RENJA)

**KECAMATAN JATIWARAS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**



**KECAMATAN JATIWARAS
KABUPATEN TASIKMALAYA**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah_Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 dapat terselesaikan. Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 dapat dilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang. Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 diterbitkan sebagai norma, standar, prosedur, kriteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiwaras pada tahun 2025.

Semoga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan capaian kinerja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih. Waalaikum salam wr. wb.

Jatiwaras, Januari 2025

Camat Jatiwaras, Ttd,



HANHAN NUGRAHA, S. E.

Pembina

NIP. 19691117 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.3.1. Maksud	10
1.3.2. Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
KECAMATAN JATIWARAS TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiwaras Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiwaras	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras	31
2.2.1 Penerapan Reward and Punishment	37
2.2.2 Penerapan Punishment	37
2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras	38
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Jatiwaras	41
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JATIWARAS	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	51
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIWARAS	54
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Gambar 1.2	Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 (Form E.81)
Tabel 2.1.1	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
Tabel 2.1.2	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
Tabel 2.2	Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Tugas Utama Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Jatiwaras
Tabel 4.1	Rencana Target Kinerja Keuangan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
Tabel 4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana

pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Jatiwaras, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Jatiwaras merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jatiwaras, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Jatiwaras yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen

Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD,

orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

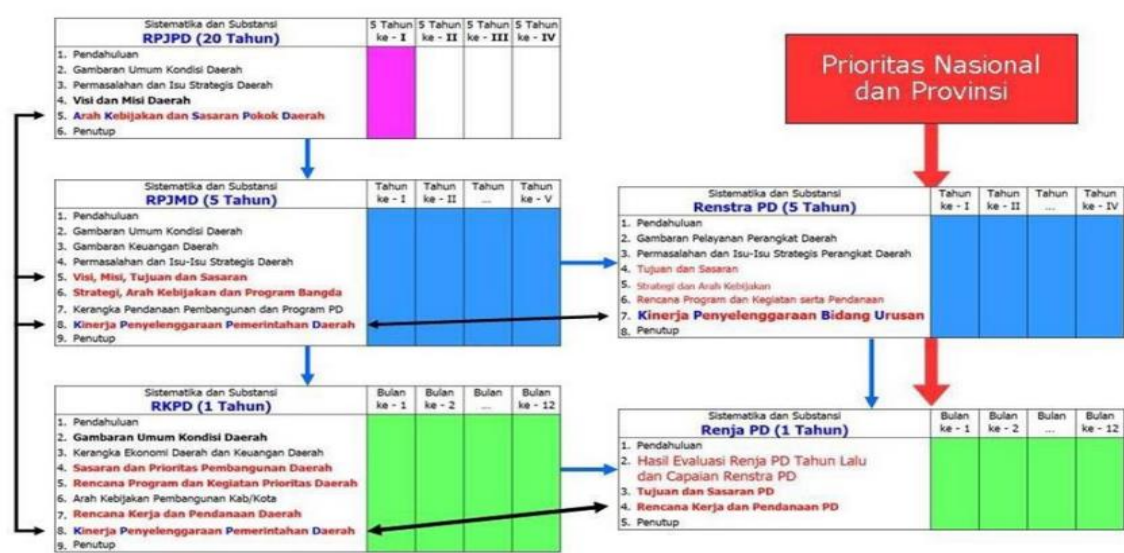
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

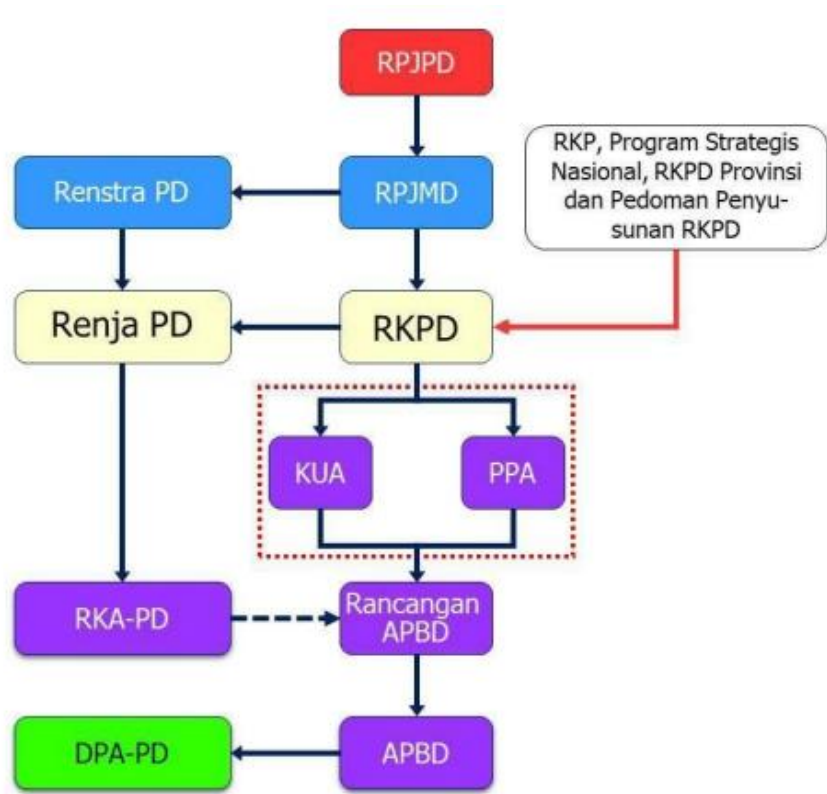
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2

Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam awal tahun anggaran. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025, merupakan Rancangan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Jatiwaras mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatiwaras.

Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiwaras yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran yang amat strategis dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai aparatur terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jatiwaras dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025 dapat tercapai.

2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tasikmalaya guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tasikmalaya.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Jatiwaras dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kecamatan Jatiwaras.
4. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Jatiwaras dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

JATIWARAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan

Jatiwaras Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan Jatiwaras

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

2.2.1. Penerapan Reward and Punishment

2.2.2. Penerapan Punishment

2.3. Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Jatiwaras

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JATIWARAS

3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIWARAS

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
JATIWARAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiwaras Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiwaras

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 2.463.271.398,00 yang terdiri dari belanja operasi Rp. 2.228.081.142,00 yang terdiri dari 5 (lima) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dari kegiatan tahun 2024 (sampai dengan triwulan IV) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jatiwaras dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dari realisasi fisik sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) yang mencapai fisiknya mencapai 100 %
- B. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) yang pencapaiannya 90,45 %

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, yaitu :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun hasil Evaluasi Terhadap Renja selama tahun 2024 sampai dengan triwulan IV sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 Formulir E.81 sesuai dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

Tabel 2.1.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JATIWARAS
TAHUN 2024 (Form E.81)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024		REALISASI TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (11 = 7+8+9+10)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (12 = 11/6*100%)		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
							I		II		III		IV						
					K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	poin	61	1.955.646.398	2077%	406.163.228	11888%	482.831.889	7806%	376.896.277	12313%	464.067.448	88,4597	1.729.958.842	88,459695	1.729.958.842	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.735.001.398	2153%	373.489.247	2557%	443.651.585	7145%	316.978.848	11976%	379.603.031	87,2462	1.513.722.711	87,246195	1.513.722.711	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bln	0	1.735.00 1.398	21 53 %	373.489. 247	2557%	443. 651. 585	7145%	316. 978. 848	11976 %	379.603. 031	87,2 462	1.513.7 22.711	87,2 4619 5	1.513.722.7 11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	10 0	83.053.6 00	11 35 %	9.423.60 0	1278%	10.6 15.5 00	30373 %	32.2 42.2 00	9113%	29.381.9 00	98,3 259	81.663. 200	98,3 259	81.663.200	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	38.558.6 00	88 1%	3.398.60 0	1210%	4.66 5.50 0	52143 %	24.3 27.2 00	2527%	6.146.90 0	99,9 4709	38.538. 200	99,9 4709 4	38.538.200	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	4.000.00 0	25 00 %	1.000.00 0	5750%	2.30 0.00 0	3043%	700. 000	0%	0	100	4.000.0 00	100	4.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen	36	2.000.00 0	10 00 %	200.000	1000%	200. 000	30000 %	600. 000	16667 %	1.000.00 0	100	2.000.0 00	100	2.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	6.600.00 0	15 15 %	1.000.00 0	1515%	1.00 0.00 0	9000%	900. 000	41111 %	3.700.00 0	100	6.600.0 00	100	6.600.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	31.895.0 00	11 99 %	3.825.00 0	768%	2.45 0.00 0	23327 %	5.71 5.00 0	32432 %	18.535.0 00	95,7 0466	30.525. 000	95,7 0465 6	30.525.000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	56.000.000	2079%	11.644.181	1916%	10.729.454	10255%	11.003.529	18468%	20.320.817	95,88925	53.697.981	95,889252	53.697.981	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang isediakan	laporan	2	11.200.000	754%	844.181	473%	529.454	15177%	803.529	83641%	6.720.817	79,44626	8.897.981	79,446259	8.897.981	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	2	44.800.000	2411%	10.800.000	2277%	10.200.000	10000%	10.200.000	13333%	13.600.000	100	44.800.000	100	44.800.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	81.591.400	1422%	11.606.200	2186%	17.835.350	9348%	16.671.700	20851%	34.761.700	99,12191	80.874.950	99,121905	80.874.950	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit/tahun	9	66.641.400	1441%	9.604.900	2189%	14.590.350	9370%	13.671.700	20529%	28.066.700	98,93797	65.933.650	98,937972	65.933.650	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit/ tahun	2	14.950.000	1339%	2.001.300	2171%	3.245.000	9245%	3.000.000	22317%	6.695.000	99,94181	14.941.300	99,941806	14.941.300	
	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Jatiwaras	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	poin	85,22	245.810.000	0%	0	743%	18.260.000	10643%	19.435.000	104214%	202.540.100	97,73203	240.235.100	97,732029	240.235.100	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	laporan	4	208.500.000	0%	0	320%	6.665.000	12393%	8.260.000	227654%	188.042.200	97,34638	202.967.200	97,346379	202.967.200	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	4	208.500.000	0%	0	320%	6.665.000	12393%	8.260.000	227654%	188.042.200	97,34638	202.967.200	97,346379	202.967.200	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	laporan	2	15.000.000	0%	0	2000%	3.000.000	17233%	5.170.000	13211%	6.830.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	15.000.000	0%	0	2000%	3.000.000	17233%	5.170.000	13211%	6.830.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	laporan	1	22.310.000	0%	0	3853%	8.595.000	6987%	6.005.000	12769%	7.667.900	99,8113	22.267.900	99,811295	22.267.900	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	1	22.310.000	0%	0	3853%	8.595.000	6987%	6.005.000	12769%	7.667.900	99,8113	22.267.900	99,811295	22.267.900	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jatiwaras	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	205.600.000	0%	0	7791%	160.187.700	470%	7.530.000	45152%	33.999.500	98,11148	201.717.200	98,111479	201.717.200	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tida

																			k tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			205.600.000	0%	0	7791%	160.187.700	470%	7.530.000	45152%	33.999.500	98,11148	201.717.200	98,111479	201.717.200	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	2	205.600.000	0%	0	7791%	160.187.700	470%	7.530.000	45152%	33.999.500	98,11148	201.717.200	98,111479	201.717.200	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jatiwaras	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	0%	0	0%	0	#DIV/0!	17700000	4124%	7300000	100	25.000.000	100	25.000.000	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	0%	0	0%	0	#DIV/0!	17.700.000	4124%	7.300.000	100	25.000.000	100	25.000.000	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	orang	5	25.000.000	0%	0	0%	0	#DIV/0!	17700000	4124%	7300000	100	25.000.000	100	25.000.000	
	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jatiwaras	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	31.215.000	5336%	16.655.000	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	14.515.000	99,85584	31.170.000	99,855839	31.170.000	Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pada aplikasi SIPD yang mengakibatkan adanya keterlambatan/tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggaran
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	31.215.000	5336%	16.655.000	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	14.515.000	99,85584	31.170.000	99,855839	31.170.000	

		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	doku men	2	14.560.000	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	14515000	99,69093	14.515.000	99,690934	14.515.000	
		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	doku men	1	16.655.000	1000%	16.655.000	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	100	16.655.000	100	16.655.000	

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kecamatan Jatiwaras pada tahun anggaran Perubahan 2024 sebesar Rp. 2.228.081.142,00 atau 90,45 % sedangkan untuk realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 100 % artinya seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan mencapai target.

Berdasarkan tabel 2.1 evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2024 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cigalontang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana pada tabel 2.1.2.

**Realisasi Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi
Target Kinerja Hasil / Keluaran yang Direncanakan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
1	2
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di Kecamatan Jatiwaras tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah :
 - Adanya beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang) pada beberapa obyek sulit di prediksi kebutuhannya (kapan perlu diganti suku cadang). Termasuk juga belanja pemakaian Listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran) , meskipun target fisik bisa tercapai 100%;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- Kualitas dan kompetensi SDM yang semakin meningkat, penyusunan perencanaan yang baik, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, meningkatnya peran lembaga sosial kemasyarakatan, meningkatnya partisipasi dan swadaya Masyarakat serta terjalinnya sinergitas antar lembaga dalam forkompincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan);
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
- a) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Adapun realisasi target kinerja keuangan Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.2

Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.463.271.395,00	2.228.081.142,00	90,45
7	01				KECAMATAN	1.735.681.398,00	1.514.402.711,00	87,25
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	946.593.646,00	872.285.371,00	92,15

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	789.087.752,00	642.117.340,00	81,38
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	727.590.000,00	713.678.431,00	98,09
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.645.000,00	216.236.131,00	98,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.053.600,00	81.663.200,00	98,33
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.558.600,00	38.538.200,00	99,95
7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	100
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.600.000,00	6.600.000,00	100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.895.000,00	30.525.500,00	95,70
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000,00	53.697.981,00	95,89
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.200.000,00	8.897.981,00	79,45
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	100
1					2	3	4	5
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.641.400,00	65.933.650,00	98,94
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.950.000,00	14.941.300,00	99,94
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.810.000,00	240.235.100,00	97,73
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.500.000,00	202.235.100,00	97,35
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	208.500.000,00	202.967.200,00	97,35

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.310.000,00	22.267.900,00	99,81
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	22.310.000,00	22.267.900,00	99,81
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	205.600.000,00	201.717.200,00	98,11
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	205.600.000,00	201.717.200,00	98,11
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	205.600.000,00	201.717.200,00	98,11
1					2	3	4	5
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.215.000,00	31.170.000,00	99,86
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.215.000,00	31.170.000,00	99,86
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.560.000,00	14.515.000,00	99,69
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	16.655.000,00	16.655.000,00	100

7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.463.271.395,00	2.228.081.142,00	90,45
---	----	----	------	----	--	------------------	------------------	-------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Jatiwaras sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras			60 (CC)	60 (CC)	64,70 (C)	65 (C)	50,20 (CC)	50,20 (CC) Capaian 2023	N/A	64,70 (C)	65 (C)	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada penilaian dari Inspektorat,
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras			84,97	84,33	83,50	85,74	81,26	82,53	N/A	83,50	85,74	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,6%
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	25%	25%	25%	N/A	25%	25%	25%	25%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran

4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan
	Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya disiplin kinerja SDM Aparatur Kecamatan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/ digunakan sebagai penunjang pada kegiatan tersebut kurang memadai.

➤ Rekomendasi :

Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;

➤ Faktor pendorong:

Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kerjasama dan Koordinasi secara berkala dengan pihak – pihak lain seperti TNI,Polri dan Masyarakat (RT/RW) agar situasi di lapangan terpantau dan terjaga stabilitasnya.

- c) Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
 - d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:
Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan pelaporan
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparatur perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 1 indikator yaitu :
- a) Persentase peningkatan Status Desa belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Idealnya dalam setiap pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal serta Prosedur Operasional Standar yang bisa diukur dengan Indikator Kinerja Kunci. Kecamatan Jatiwaras sendiri saat ini telah menerapkan Standar Pelayanan Pemerintah

(SPP) melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adanya minimnya aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat membantu serta menunjang tugas pelayanan yang ada di Kecamatan Jatiwaras yakni pada masing-masing seksi serta subbag yang ada. Namun secara umum, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini dapat dikatakan baik dan memenuhi target kinerja yang diharapkan dan tetap menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan semaksimal mungkin di masa mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

2.2.1. **Penerapan Reward and Punishment**

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Jatiwaras) perlu dilakukan *Reward and Punishment* hal ini bertujuan untuk memberikan ransangan motivasi bagi para pegawai yang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat predikat pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.2.2. **Penerapan Punishment**

Di samping reward juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai tidak hadir tanpa izin.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras

Berdasarkan pada pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiwaras dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja Kecamatan Jatiwaras dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras tidak tercapai karena disebabkan karena belum maksimalnya dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerjanya.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras, antara lain :

Sekretariat

- b. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Jatiwaras, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Trantibum Kecamatan Jatiwaras;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Jatiwaras

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

- e. Lambatnya aparaturnya Desa dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :
 - 1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
 - 2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Jatiwaras, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
 - 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum.
 - 4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Jatiwaras tahun 2025 dilalui melalui tahapan berikut :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Jatiwaras yang tercantum dalam RKPD 2024 menyesuaikan dengan regulasi baru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2025;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiwaras yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Jatiwaras yang merupakan program lanjutan dan/atau prioritas sudah tertuang dalam RKPD 2025;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiwaras antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jatiwaras berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan Lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Renja Kecamatan Jatiwaras tahun 2025 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan

yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan 100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digarisbawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja SKPD. Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

Perangkat Daerah: Kecamatan Jatiwaras

Kode					Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ket
					Program /kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan /Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan		1.888.081.346						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		1.420.401.268						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jatiwaras	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.420.401.268						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90.003.632						
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jatiwaras	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	40.003.632						

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Jatiwaras	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	8.000.000						
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	7.000.000						
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	35.000.000						
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		190.963.000						
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kec. Jatiwaras	Jumlah paket mebel yang disediakan	8 unit	91.500.000						
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatiwaras	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	99.463.000						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase pemenuhan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		52.780.000						

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	7.980.000						
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	44.800.000						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase pemenuhan layanan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		133.933.446						
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jatiwaras	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	99.000.000						
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jatiwaras	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	10.145.846						
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jatiwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	24.787.600						

7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		193.000.000						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		150.000.000						
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Jatiwaras	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4 Laporan	150.000.000,						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		20.000.000						
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	20.000.000						

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		23.000.000						
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	23.000.000						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		200.000.000						
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		200.000.000						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Jatiwaras	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	200.000.000						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan		25.000.000						

							umum									
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatiwaras	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		25.000.000							
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Jatiwaras	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	25.000.000							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		45.000.000							

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jatiwaras	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		45.000.000						
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kec. Jatiwaras	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 Dokumen	20.000.000						
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Jatiwaras	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	25.000.000						
									2.351.081.346						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dibahas dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Masyarakat atau pemangku jabatan kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tugas Utama
Kecamatan Jatiwaras
Tahun 2025

N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah yang dilaksanakan	1.888.081.346	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	193.000.000	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	200.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatiwaras	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	45.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam pelaksanaan penyusunan Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 tetap berjalan sesuai yang diharapkan, maka Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak bersifat program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sebagai SKPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan disamping melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Jatiwaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kecamatan Jatiwaras diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan
3. Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Jatiwaras

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanisme yang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Jatiwaras sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Jatiwaras.

Program dan Kegiatan pada Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 tertuang di dalam lampiran renja ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program dan kegiatan renja SKPD Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 kami sajikan dalam tabel lampiran renja ini.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Cigalontang. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA
KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIWARAS

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras		64,70 (C)
		2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras minimal baik		83,50 (B)
		3 Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwaras	- Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		100%
			- Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100%
			- Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIWARAS

Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada di Kecamatan Jatiwaras baik sekretariat maupun seksi-seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses Pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Tabel. 4.1
Rencana Target Kinerja Keuangan
Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.351.081.346	2.351.081.346	100%
7	1				KECAMATAN	2.351.081.346	2.351.081.346	100%
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.888.081.346	1.888.081.346	100%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.420.401.268	1.420.401.268	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.420.401.268	1.420.401.268	100%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.003.632	90.003.632	100%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.003.632	40.003.632	100%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	100%
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,	7.000.000,	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	35.000.000	35.000.000	100%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.963.000,	190.963.000,	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	91.500.000	91.500.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.463.000	99.463.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.780.000	52.780.000	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.980.000	7.980.000	100%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.800.000	44.800.000	100%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.842.000	85.842.000	100%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.000.000	99.000.000	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.145.846	10.145.846	100%
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.787.600	24.787.600	100%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	193.000.000	193.000.000	100%
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.000.000	150.000.000	100%
7	1	2	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150.000.000	150.000.000	100%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	20.000.000	20.000.000	100%
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	100%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.000.000	23.000.000	100%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	23.000.000	23.000.000	100%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000.000	200.000.000	100%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	200.000.000	100%
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	200.000.000	200.000.000	100%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.000.000	45.000.000	100%
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	20.000.000	100%
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.000.000	25.000.000	100%

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN JATIWARAS KAB. TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	7.980.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	44.800.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.933.446,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai	-	0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	99.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	10.145.846,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.787.600,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	193.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	7.980.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	44.800.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.933.446,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai	-	0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	99.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	10.145.846,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.787.600,00	Kab. Tasikmalaya, Jatwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pegawai		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	193.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	200.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatiwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	25.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Masyarakat	-	0,00	KECAMATAN JATIWARAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatiwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Masyarakat		0,00	KECAMATAN JATIWARAS
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	45.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	45.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa	-	0,00	KECAMATAN JATIWARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatiwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN JATIWARAS	
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Jatiwaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Inovasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN JATIWARAS	
	J U M L A H							2.351.081.346,00							0,00		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Kecamatan Jatiwaras.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jatiwaras akan dilaksanakan Tahun 2025, Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Cigalontang Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwaras.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada awal Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan

Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Jatiwaras.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025. Kecamatan Jatiwaras sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Jatiwaras dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Jatiwaras. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Jatiwaras.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Jatiwaras ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Jatiwaras Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Jatiwaras, Januari 2025

Camat Jatiwaras



HANHAN NUGRAHA, S.E.

Pembina

NIP. 19691117 199303 1 003